DEMOKRASI COMPANG-CAMPING PEMIRA DI KAMPUS HUKUM

Sekedar isu kah?

Oleh:

Abraham Adi dan Nailul Amany

Seperti kita ketahui bersama, Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) sedang digelar Fakultas Hukum (FH) UGM. Terlepas dari tersosialisasikannya Pemira bagi seluruh mahasiswa FH UGM, terselip harapan hadirnya semangat demokrasi kecil-kecilan ala mahasiswa di kampus hukum ini. Harapan sederhana inilah yang menggerakan "ornamen kampus" merealisasikan (yang katanya) pesta demokrasi ala mahasiswa. Panitia dibentuk, aturan main disusun, tanggal-tanggal dipilih dan pengumuman pun disebar. Berbagai persiapan pelaksanaan Pemira ini turut memeriahkan hiruk-pikuk suasana perpolitikan kampus.

Atas pertimbangan libur natal dan tahun baru serta minggu tenang sebelum ujian akhir semester sudah semakin dekat, akhirnya Pemira dijadwalkan pada 21 – 23 Desember 2010. Dalam waktu yang relatif singkat, persiapan Pemira pun terlihat serba terburu-buru. Alhasil, ketidaksiapan tersebut memunculkan kejanggalan-kejanggalan dalam persiapan penyelenggaraan Pemira. Berbagai isu negatif pun muncul. Panitia dan organ pendukung Pemira diduga tidak melaksanakan persiapan sesuai dengan aturan mainnya. Bagaimana mungkin ranah pembelajaran politik dan demokrasi bagi mahasiswa malah dijadikan ranah manipulasi politik yang mencederai suasana pesta demokrasi yang sedang akan digelar ini?, benarkah hanya sekedar isu?

Pemira FH UGM merupakan proses pemilihan untuk mendapatkan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Justicia dan anggota Perwakilan Elemen Mahasiswa(PEM) Fakultas Hukum UGM. Pemira sendiri memiliki tiga alat kelengkapan yaitu Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) yang bertugas sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemira (Banwasra) yang bertugas mengawas pelaksanaan Pemira, dan Mahkamah Pemira sebagai "Pengadilan". Ketiga alat kelengkapan tersebut di rekrut oleh Badan PEM.

Isu itu lahir ketika ada dugaan bahwa panitia Pemira dianggap tidak netral dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksana teknis yang dikenal dengan Organizing Committee (OC) diduga telah mencederai fungsinya sendiri sebagai panitia penyelenggara Pemira. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raihan Aditama (ketua OC Pemira), sudah seharusnya OC bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu calon. Bahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik ketua hingga staff OC tidak diperbolehkan untuk dipakai sebagai bukti dukungan kepada peserta Pemira tertentu, "*OC harus benar – benar netral*", tegas Raihan.

Namun, kenyataannya masih ada saja koordinator OC yang memihak peserta Pemira dengan cara membantu mengumpulkan KTM untuk mendukung peserta Pemira. Mengenai kabar adanya salah satu dari anggota OC yang membantu jumlah pengumpulan KTM tersebut, Raihan mengatakan, "S*aya baru saja mendengar isu ini tadi pagi. Saya sudah mencoba untuk mencari tahu siapa koordinator yang dimaksud benar-benar telah membantu peserta Pemira, tetapi kenyataannya tidak ada*".

Raihan mengungkapkan bila benar ada koordinator OC yang bersikap tidak netral maka ia siap mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada yang bersangkutan untuk diberhentikan oleh KPRM. Perlu diketahui bahwa OC bergerak berdasarkan arahan KPRM, dan penanggung jawab OC adalah KPRM tersebut. Menurut pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Dema, "KPRM berwenang menonaktifkan sementara dan / atau memberikan sanksi administratif kepada anggota KPRM dan OC Pemira yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemira yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Banwasra dan ketentuan peraturan perundang--undangan."

Raihan menambahkan, "Bila benar ada (pelanggaran dari koordinator OC-red) tetap harus ada bukti yang valid. Karena tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang luar saja. Kerja OC juga berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan jalannya Pemira"

Mengenai bukti yang valid itu sendiri, tim penulis telah berhasil mendapatkannya, dari sumber yang bisa penulis pertanggungjawabkan, terkait pelanggaran yang dilakukan koordinator OC tersebut. Ia mengirimkan sms kepada salah satu anggota tim sukses calon peserta yang berbunyi:

"Kak, KTM buat mas ---- alihin buat Mas (peserta calon ketua lain) atau (peserta calon lain) dong"

*atas alasan asas praduga tak bersalah, nama tokoh tidak kami cantumkan seperti sms sesungguhnya-red.

Seperti yang kita pahami, bahwa salah satu syarat pendaftaran calon Ketua DEMA Justicia adalah dengan menyertakan seratus KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) FH UGM, yang pada dasarnya pemberlakuan syarat ini adalah untuk merepresantasikan bahwa bakal calon telah didukung oleh seratus mahasiswa FH UGM. Sayangnya, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa seratus KTM tersebut dikumpulkan oleh para tim sukses masing-masing peserta calon dari mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan tidak tahu-menahu akan digunakan untuk apa KTM mereka, kalaupun mereka tahu akan digunakan untuk pemenuhan syarat pencalonan ketua DEMA namun tidak sedikit yang tidak mengetahui kepada calon yang mana KTM mereka akan disertakan.

Menurut keterangan narasumber, anggota tim sukses calon peserta yang gagal mendaftar tersebut, menolak untuk mengalihkan jumlah suaranya dengan alasan bahwa KTM yang terkumpul padanya adalah suara warga kampus dan hal tersebut merupakan amanah, sehingga tidak dapat secara sepihak dialihkan untuk mendukung peserta Pemira lainnya.

Fakta yang terpapar di atas rasanya cukup untuk menduga bahwa ketidaknetralan telah mengkontaminasi panitia penyelenggara. Atas situasi ini demokrasi atas nama Pemira terasa begitu kedodoran. Agaknya perlu bagi OC Pemira segera tersadarkan bahwa ada kotoran-kotoran yang harus segera dideteksi dan disapu bersih dari penyelenggaraan Pemira.

Penyelenggaraan Pemira tahun ini terkesan kurang matang, mulai dari perekrutan yang dilakukan oleh PEM, jadwal yang mulai terlihat molor, belum dilantiknya badan vital penyelenggara Pemira hingga dalam proses penyelenggaraannya yaitu kurangnya koordinasi antara Banwas dan KPRM. Muhamad Sulthoni selaku Ketua KPRM pun tidak mengelak adanya ketertinggalan serta lambannya persiapan Pemira di FH UGM, dibandingkan dengan fakultas lain. Thoni mengakui kalau KPRM yang bekerja saat ini saja belum dilantik, dikarenakan waktu penyelenggaraan Pemira sudah mendesak. Semuanya serba cepat dan terburu – buru sehingga ada beberapa hal yang tertinggal. Thoni sebagai representasi KPRM pun berjanji untuk menyelenggarakan Pemira dengan baik. KPRM tidak mau membuat malu fakultas, cukup yang membuat malu adalah *open recruitmen* yang lama, peraturan DEMA yang dibuat dalam waktu singkat serta perekrutan alat kelengkapan dan sebagainya yang berantakan, untuk pelaksanannya nanti diharapkan lebih total.

Itikad baik ini tentu harus diapresiasi namun juga harus direalisasikan dalam sebuah tindakan yang nyata. Ketika pada akhirnya memang ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemira kali ini, maka merupakan sebuah kewajiban bagi lembaga-lembaga yang

dibentuk terkait dengan penyelenggaraan Pemira untuk meindaklanjuti pelanggaran tersebut sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh anggota FH UGM.

Masih ada harapan yang digantungkan kepada mereka yang berani berkomitmen dalam sebuah lembaga penggerak politik kampus untuk mewujudkan kondisi demokrasi yang ideal, bukan demokrasi yang compang-camping.